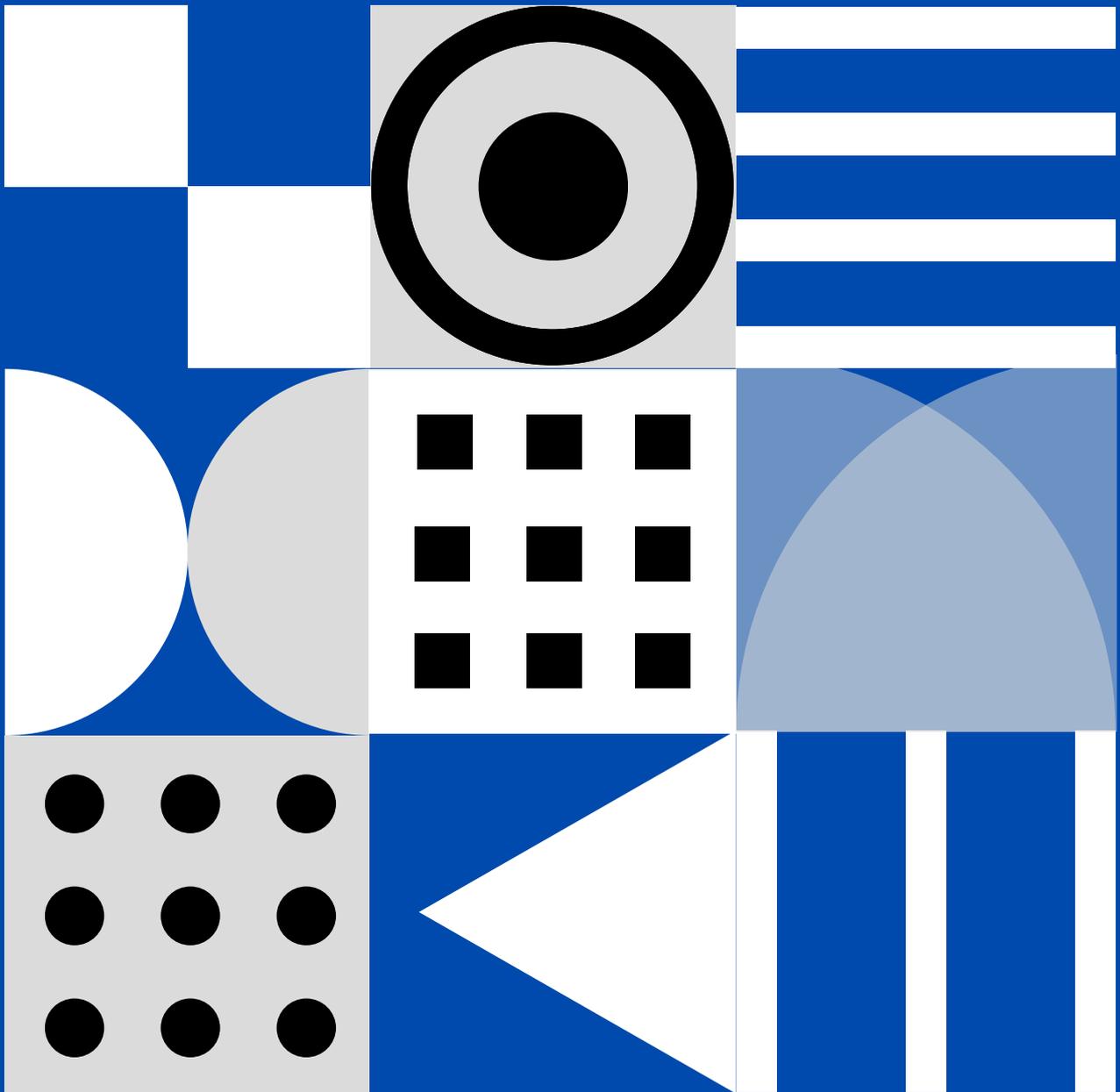


# Panduan Pemantauan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi bagi Masyarakat Sipil

2021



Transparency International Indonesia adalah anggota gerakan global Transparency International yang memiliki satu visi: dunia di mana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan kehidupan sehari-hari masyarakat bebas dari korupsi.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa di bawah proyek “*Strengthening Accountability Networks among Civil Society*”, yang membantu warga biasa di 21 negara untuk mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Isi publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau gerakan Transparency International.



Funded by  
the European Union



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
Indonesia  
the global coalition against corruption

## **Panduan Bagi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**

Penulis: Transparency International Indonesia  
Kontributor: Koalisi Pemantau Peradilan dan Aliansi  
Jurnalis Independen

Cover: Transparency International Indonesia

2022. Transparency International Indonesia. Except where  
otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0  
DE. Quotation permitted.



# DAFTAR ISI

- 01** Daftar Isi
- 02** Daftar Singkatan
- 03** Bab I Pendahuluan
  - 03** A. Latar Belakang
  - 04** B. Tujuan
- 05** Bab II Metode Pemantauan
  - 05** A. Metodologi Pemantauan
  - 07** B. Indikator Pemantauan
- 09** Bab III Panduan Pertanyaan
  - 09** A. Langkah Pemantauan Rekam Jejak
  - 10** B. Formulir Penelusuran



# DAFTAR SINGKATAN

<b>CHA</b>	Calon Hakim Agung
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>KDRT</b>	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>KPP</b>	Koalisi Pemantau Peradilan
<b>KTP</b>	Kartu Tanda Penduduk
<b>KY</b>	Komisi Yudisial
<b>LHKPN</b>	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
<b>MA</b>	Mahkamah Agung
<b>NPWP</b>	Nomor Pokok Wajib Pajak
<b>Ormas</b>	Organisasi Masyarakat
<b>TII</b>	Transparency International Indonesia



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi ditengah banyaknya putusan kontroversial yang menciderai kepercayaan publik. Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan **34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020**. Dari data KPK, sejak 2004 hingga 2018, ada 22 hakim dan enam panitera pengadilan serta pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) yang terlibat kasus korupsi.

Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), **setidaknya tercatat 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK atas kasus tindak pidana korupsi**. Beberapa diantaranya adalah hakim-hakim yang khusus menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini tentu dapat **menciderai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya yang berkaitan dengan integritas penegak hukum, komitmen dalam pemberantasan korupsi, serta komitmen dalam mendukung reformasi peradilan**.

Berkaitan dengan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilaksanakan Komisi Yudisial (KY) untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, **Koalisi Masyarakat Sipil memandang perlu untuk turut terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap calon-calon hakim agar dapat menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung penuh reformasi peradilan**.



# PENDAHULUAN



Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (uji kelayakan) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.” serta Pasal 17 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi

*“Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap para calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”*

memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki kedudukan hukum untuk melakukan penelusuran rekam jejak dan pemantauan dalam rangka memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim.

Berkaca pada hal tersebut, Transparency International Indonesia (TII) bersama Koalisi Masyarakat Sipil khususnya Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyusun sebuah panduan bagi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.

## B. Tujuan

1. Memfasilitasi proses pemantauan kelompok masyarakat sipil dalam proses seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim AdHoc Tipikor;
2. Menggalang partisipasi publik yang terorganisir untuk menjaga kualitas proses seleksi dan memberikan catatan-catatan tentang rekam jejak para kandidat;
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap pentingnya Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor yang berintegritas bagi institusi peradilan

# BAB II METODE PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap masing-masing Calon dengan melibatkan jurnalis ataupun mitra daerah melalui proses menggali rekam jejak Calon di daerah tempat bekerja Calon sebelumnya. Pemantauan dilakukan masyarakat secara kolektif dengan berbagai unsur masyarakat lainnya. Di dalam panduan ini, kelompok masyarakat yang aktif memantau proses seleksi disebut dengan Tracker.

Proses pemantauan yang dilakukan oleh pemantau meliputi:



## No. 01 – Wawancara Narasumber

Melakukan penelusuran informasi primer dengan metode wawancara:

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.



## No. 02 – Media Tracking

Melakukan penelusuran sekunder berbasis informasi dari website resmi pemerintah, kanal berita - media massa serta histori media sosial. Penelusuran dapat memanfaatkan metode *social network analysis*



## No. 03 – Analisa Putusan Pengadilan

Penelusuran dan analisis dokumen laporan kasus dan putusan pengadilan



## No. 04 – Penelusuran LHKPN

Penelusuran dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)



## No. 05 – Penelusuran Relasi Bisnis

Penelusuran dokumen bisnis/nama perusahaan dan posisi di perusahaan yang berkaitan dengan calon



## No. 06 – Penelusuran Rekam Jejak Profesional

Penelusuran dokumen kinerja profesional di instansi/lembaga calon



# METODE PEMANTAUAN

Kriteria Calon Hakim Agung (CHA) mengacu pada **Pasal 24A UUD 1945**: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak bercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dalam pemantauan ini, *Tracker* membagi indikator pemantauan menjadi empat aspek utama, yaitu: **integritas, independensi, kompetensi, dan perspektif Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)**. Hal ini berdasarkan pada catatan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kriteria ideal CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, diantaranya sebagai berikut:

1. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor;
2. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
3. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
4. CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
5. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
6. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
7. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

## ***Empat Aspek Utama Pemantauan:***

- a. Integritas***
- b. Independensi***
- c. Kompetensi***
- d. Perspektif HAM***



# INDIKATOR PEMANTAUAN

Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
-----------------	---------------	---------

## 1. INTEGRITAS

Kepatutan Calon pada aspek integritas diukur berdasarkan pada kepatuhan administrasi, kepatuhan Calon terhadap hukum dan etika, serta data harta kekayaan Calon yang dinilai wajar atau tidaknya.

- a. Kepatuhan Administrasi
- b. Kepatuhan Hukum dan Etika
- c. Kepatuhan Pelaporan dan Kewajaran Harta Kekayaan

- Kelengkapan administrasi calon
- Kepatuhan perpajakan
- Kewajiban individu serta usaha yang dijalankan Calon
- Laporan etik
- Pelaporan penerimaan gratifikasi
- Laporan LHKPN

## 2. INDEPENDENSI

Kepatutan Calon pada aspek independensi diukur berdasarkan pada aktivitas politik Calon, afiliasi Calon dengan organisasi masyarakat (ormas), afiliasi Calon dengan bisnis serta rekam jejak penanganan kasus dari Calon.

- a. Aktivitas Politik
- b. Afiliasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas)
- c. Afiliasi Bisnis
- d. Rekam Jejak Penanganan Kasus

- Keterlibatan calon dengan partai politik, sayap partai politik ataupun simpatisan
- Keterlibatan di Ormas baik di kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan
- Keterkaitan dengan dukungan finansial dari sektorprivat dan korporasi yang terlibat kasus korupsi



# INDIKATOR PEMANTAUAN



Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
<b>3. KOMPETENSI</b>		
Kepatutan Calon pada aspek kompetensi diukur berdasarkan pada pengalaman pekerjaan Calon, prestasi yang relevan dari Calon terkait dengan kamar yang dipilih serta dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan, latar belakang akademis Calon, serta komentar/pendapat Calon di ruang publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalaman Pekerjaan</li> <li>b. Prestasi</li> <li>c. Latar Belakang Akademis</li> <li>d. Komentar/Pendapat di Ruang Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekam jejak dalam substansi hukum maupun manajerial perkara</li> <li>• Capaian terhadap agenda pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan</li> <li>• Rekam jejak produk akademis</li> <li>• Pandangan calon terkait isu hukum, reformasi peradilan, dan isu antikorupsi di media massa dan/ media sosial</li> </ul>

<b>4. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)</b>		
Kepatutan Calon dalam aspek mengenai perspektif HAM diukur berdasarkan pada beberapa sub aspek, diantaranya yaitu perspektif Calon mengenai gender dan orientasi seksual, dampak sosial, kelompok rentan dan minoritas, lingkungan serta pemidanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gender dan Orientasi Seksual</li> <li>b. Dampak Sosial</li> <li>c. Kelompok Rentan dan Minoritas</li> <li>d. Lingkungan</li> <li>e. Pemidanaan Hukuman Mati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas seperti misalnya KDRT, pelecehan seksual, dan informasi tentang poligami/poliandri</li> <li>• Pemahaman calon terhadap dampak sosial akibat tindak pidana korupsi</li> <li>• Toleransi calon terhadap kelompok rentan, keberagaman ras, budaya, dan agama</li> <li>• Keberpihakan keadilan lingkungan</li> <li>• Pandangan terhadap hukuman mati</li> </ul>

# BAB III PANDUAN PERTANYAAN

## A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

**1.**

### Sumber Informasi Utama

Narasumber, media dan lembaga yang bersangkutan

**2.**

### Wawancara Narasumber

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.

**3.**

### Sumber Informasi Sekunder

Tracker memasukkan sumber lain yang dianggap relevan

**4.**

### Kompilasi Data

Tracker telah mencantumkan sumber informasi (media, hasil wawancara, atau sumber yang lain)

**5.**

### Kerahasiaan Data

Tracker mencatat identitas narasumber: nama, instansi, jabatan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan memastikan kerahasiaannya

**6.**

### Validasi Data

Tracker telah menyertakan dokumen pendukung. Contoh: kliping atau tautan berita dari media massa/dokumen

**7.**

### Imparsial

Tracker tidak melakukan wawancara dengan calon

**8.**

### Kelengkapan Data

Waktu pelaksanaan tracking secara objektif dicantumkan



# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.1 Kepatuhan Administrasi</b>	<b>Kelengkapan Administrasi Identitas</b>			
		1. Apakah calon memiliki kelengkapan akta kelahiran?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon 3. Keterangan Dispendukcapil
		2. Apakah calon memiliki kelengkapan KTP?	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon memiliki kelengkapan Kartu Keluarga?	Ya/Tidak		
		4. Apakah Kartu Keluarga calon sesuai dengan kondisi dan jumlah anggota keluarga yang sebenarnya?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.1 Kepatuhan Administrasi</b>	<b>Kepatuhan Perpajakan</b>			
		1. Apakah calon memiliki NPWP?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Keterangan kantor pajak dan dokumen NPWP 2. Media tracking 3. Wawancara lingkaran calon
		2. Apakah calon taat dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak?	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon masuk dalam daftar hitam kantor pajak atau memiliki kasus pajak? (konfirmasi ke kantor pajak atau tracking media)	Ya/Tidak		
		4. Jika calon memiliki usaha, apakah calon memiliki NPWP Badan Usaha?	Ya/Tidak		
		5. Jika calon memiliki usaha, apakah calon taat dalam menjalankan kewajiban pajak pada badan usahanya?	Ya/Tidak		

	<b>A.2 Kepatuhan Hukum dan Etika</b>	<b>Kepatuhan Terhadap SOP Lembaga Internal</b>			
		1. Apakah calon pernah melanggar SOP di lembaga internalnya?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon
		2. Apakah calon pernah diketahui melaporkan gratifikasi yang ia terima?	Ya/Tidak		

		<b>Catatan Sengketa dan atau Pelanggaran Hukum Perdata atau Pidana</b>			
		1. Apakah calon pernah terlibat atau diduga terlibat atau didakwa dalam suatu tindak pidana? (Uraikan jenis pidananya dan bentuk keterlibatannya)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Putusan Pengadilan 3. Dokumen Laporan Kasus 4. Wawancara lingkaran calon
		2. Apakah sudah ada putusan tetap (inkracht) atas tindak pidana tersebut? (Uraikan juga sanksi pengadilan yang dijatuhkan kepada calon)	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon pernah terlibat atau diduga terlibat atau didakwa dalam suatu perkara perdata? (Uraikan jenisnya dan bentuk keterlibatannya)	Ya/Tidak		

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.2 Kepatuhan Hukum dan Etika</b>	<b>Catatan Sengketa dan atau Pelanggaran Hukum Perdata atau Pidana</b>			
		4. Apakah sudah ada putusan tetap (inkracht) atas perkara perdata tersebut? (Uraikan juga sanksi pengadilan yang dijatuhkan kepada calon)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Putusan Pengadilan 3. Dokumen Laporan Kasus 4. Wawancara lingkaran calon
		5. Apakah calon pernah terlibat atau diduga terlibat atau didakwa terkait tindak pidana khusus (kejahatan HAM/Perusakan lingkungan/terorisme/narkoba/perdagangan manusia)? (Uraikan bentuk kejahatannya dan bentuk keterlibatan atau dakwaan terhadap calon)	Ya/Tidak		
		6. Apakah sudah ada putusan tetap (inkracht) atas tindak kejahatan tersebut? (Uraikan juga sanksi pengadilan yang dijatuhkan kepada calon)	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.2 Kepatuhan Hukum dan Etika</b>	<b>Gaya Hidup</b>			
		1. Bagaimana pola relasi dan komunikasicalon dengan rekan kerjanya?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon
		2. Apakah selama ini calon pernah terlibat konflik dengan rekan kerja?	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon mampu bersosialisidengan baik dengan lingkungan sosialnya?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.2 Kepatuhan Hukum dan Etika</b>	<b>Catatan Profesi dari Organisasi (Hakim, Advokat, ASN, dll)</b>			
		1. Apakah calon pernah menyalahgunakan jabatannya dalam lingkungan kerja dan sosial untuk kepentingan pribadinya Bagaimana bentuk penyalahgunaan tersebut?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon
		2. Apakah calon pernah melanggar kode etik profesinya?	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon mampu bersosialisidengan baik dengan lingkungan sosialnya?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
1.	<b>A. INTEGRITAS</b>				
	<b>A.3 Harta Kekayaan</b>	<b>LHKPN</b>			
		1. Apakah calon melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) secara tertib kepada KPK? (hanya untuk calon yang berasal dari pejabat negara)	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media tracking 2. Dokumen LHKPN
		2. Apakah harta kekayaan calon dinilai wajar?	Ya/Tidak		

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
2	<b>B. INDEPENDENSI</b>				
	<b>B.1 Aktivitas Politik</b>	1. Apakah calon memiliki posisi atau keterlibatan di partai politik baik di level kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan? (Jika Ya, uraikan posisi atau keterlibatan calon tsb.)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media tracking 2. Dokumen pengurus partai 3. Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, dsb.)
		2. Apakah calon memiliki afiliasi (kedekatan) secara personal atau keluarga dengan partai politik? (Jika Ya, uraikan afiliasi calon tsb.)	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon memiliki keterlibatan terhadap sayap partai politik? (Jika Ya, uraikan keterlibatan calon tsb.)	Ya/Tidak		
		4. Apakah calon pernah dipromosikan atau menjadi corong partai politik dalam berbagai bentuk kegiatan?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
2	<b>B. INDEPENDENSI</b>				
	<b>B.2 Afiliasi dengan Ormas</b>	1. Apakah calon memiliki posisi atau keterlibatan di ormas baik di level kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan? (Jika Ya, uraikan posisi atau keterlibatan calon tsb.)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media tracking 2. Dokumen pengurus ormas 3. Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan ormas, dsb.)
		2. Apakah calon memiliki afiliasi (kedekatan) secara personal atau keluarga dengan ormas? (Jika Ya, uraikan afiliasi calon tsb.)	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon memiliki keterlibatan terhadap sayap ormas? (Jika Ya, uraikan keterlibatan calon tsb.)	Ya/Tidak		
		4. Apakah calon pernah dipromosikan atau menjadi corong ormas dalam berbagai bentuk kegiatan?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
2	<b>B. INDEPENDENSI</b>				
	<b>B.3 Afiliasi Bisnis</b>	1. Apakah calon memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan bisnis yang memiliki kedekatan dan atau pengaruh terhadap kekuasaan (Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung, dan lainnya)?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Putusan Pengadilan 3. Dokumen Laporan Kasus 4. Dokumen LHKPN 5. Dokumen bisnis/ nama perusahaan dan posisi di perusahaan
		2. Apakah calon memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan bisnis yang sedang dan atau telah berperkara tipikor?	Ya/Tidak		
		3. Apakah calon memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan bisnis secara personal dan atau keluarga atau layer berapapun namun berhubungan langsung termasuk dukungan pendanaan dan lainnya?	Ya/Tidak		

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
2	<b>B. INDEPENDENSI</b>				
	<b>B.4 Rekam Jejak Penanganan Kasus</b>	1. Apakah calon memiliki latar belakang keterlibatan dan atau keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tipikor?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Putusan Pengadilan 3. Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb.) 4. Dokumen Laporan Kasus
		2. Apakah calon pernah menangani kasus tipikor baik sebagai tim kuasa hukum maupun sebagai ahli yang mendukung tipikor?	Ya/Tidak		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
3	<b>C. KOMPETENSI</b>				
	<b>C.1 Pengalaman Pekerjaan</b>	<b>Kapabilitas Calon</b>			
		1. Jika calon berasal dari profesi Hakim, bagaimana kemampuan calon dalam menyusun legal reasoning?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		1. Media Tracking 2. Putusan Pengadilan 3. Dokumen Laporan Kasus 4. Dapat dilihat di SIPP
		2. Jika calon berasal dari profesi Advokat, bagaimana kemampuan dan perspektif calon dalam menyusun argumentasi hukum?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		
		3. Bagaimana pengalaman dan rekam jejak calon dalam perkara Tipikor?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
3	<b>C. KOMPETENSI</b>				
	<b>C.2 Prestasi</b>	<b>Kapabilitas Calon</b>			
		1. Apakah calon pernah mendapatkan penghargaan terkait dengan pemberantasan korupsi?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon
		2. Bagaimana keterlibatan calon dalam pemberantasan korupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
		3. Bagaimana keterlibatan calon dalam penyusunan kebijakan antikorupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	(Jawaban dalam bentuk uraian)	
		4. Bagaimana rekam jejak calon sebagai ahli dari pihak penegak hukum antikorupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
		5. Jika calon berasal dari profesi Hakim, apakah putusan yang dikeluarkan pada kasus Tipikor selalu pro terhadap pemberantasan korupsi?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
3	<b>C. KOMPETENSI</b>				
	C.3 Latar Belakang Akademis	1. Bagaimana pemahaman calon terkait teori pidana tentang korupsi? (mengacu pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Korupsi)	(Jawaban dalam bentuk uraian)		1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon 3. Terbitan/Publikasi karya tulis
		2. Bagaimana pemahaman calon terkait pidana tambahan? (Uang Pengganti dan Pencabutan Hak Politik)	(Jawaban dalam bentuk uraian)		
		3. Bagaimana riset atau penelitian calon terkait korupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
3	<b>C. KOMPETENSI</b>				
	<b>C.4 Komentar/Pendapat di Ruang Publik</b>	<b>Media Sosial</b>			
		1. Apakah calon pernah mengunggah status di media sosial terkait isu antikorupsi?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Penelusuran Media Sosial
		2. Bagaimana status atau unggahan calon di media sosial terkait isu antikorupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
		<b>Media Massa</b>			
		1. Apakah calon pernah menulis opini di media massa yang bersifat analisis terkait isu antikorupsi?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Publikasi di Media Massa
		2. Bagaimana opini calon tersebut di media massa terkait isu antikorupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
4	<b>D. PERSPEKTIF HAM</b>				
	<b>D.1 Gender dan Orientasi Seksual</b>	<b>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</b>			
		1. Apakah calon pernah atau sedang atau pernah diduga melakukan KDRT? (Uraikan bentuk KDRT-nya)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Tracking</li> <li>Putusan Pengadilan</li> <li>Dokumen Laporan Kasus</li> <li>Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb)</li> </ol>
		2. Apakah sudah ada putusan tetap (inkracht) atas tindakan KDRT tersebut? (Uraikan juga sanksi pengadilan yang dijatuhkan kepada calon)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
		<b>Pelecehan Seksual</b>			
		1. Apakah calon pernah atau sedang atau pernah diduga melakukan pelecehan seksual?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Tracking</li> <li>Putusan Pengadilan</li> <li>Dokumen Laporan Kasus</li> <li>Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb.)</li> </ol>
		2. Apakah sudah ada putusan tetap (inkracht) atas tindakan pelecehan seksual tersebut? (Uraikan juga sanksi pengadilan yang dijatuhkan kepada calon)	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
		<b>Poligami/Poliandri</b>			
		1. Apakah calon saat ini atau pernah melakukan poligami/poliandri?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Tracking</li> <li>Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb.)</li> </ol>

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
	<b>D.2 Dampak Sosial</b>	1. Apakah calon memiliki pemahaman yang baik terhadap dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Tracking</li> <li>Putusan Pengadilan</li> <li>Dokumen Laporan Kasus</li> <li>Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb.)</li> </ol>

# FORMULIR PENELUSURAN REKAM JEJAK CALON

No.	Aspek Penelusuran	Pertanyaan	Jawaban	Hasil Penelusuran Rekam Jejak	Sumber Penelusuran
4	<b>D. PERSPEKTIF HAM</b>				
	<b>D.3 Kelompok Rentan dan Minoritas</b>	<b>Sikap terhadap kelompok rentan, keberagaman ras, budayadan agama</b>			
		1. Apakah calon pernah mengucapkan kata-kata (verbal) atau perbuatan fisik yang berorientasi merendahkan/melecehkan kelompok rentan (perempuan, anak, kelompok disabilitas, LGBT, kelompok adat, keberagaman ras, budaya dan agama tertentu)?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon (keluarga, tetangga, rekan kerja, almamater, pergaulan politik, ormas, organisasi dsb.)
		2. Apakah calon terlibat secara aktif dalam kelompok-kelompok tertentu yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, kelompok disabilitas, LGBT, kelompok adat, keberagaman ras, budaya dan agama tertentu)?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	
					1.
	<b>D.4 Lingkungan</b>	1. Apakah calon mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan hidup pada kasus-kasus yang bersinggungan dengan lingkungan?	Ya/Tidak	Uraian dan Bukti Pendukung (Jika Ada)	1. Media Tracking
	<b>D.5 Pemidanaan Hukuman Mati bagi Koruptor</b>	1. Bagaimana perspektif calon terkait hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi?	(Jawaban dalam bentuk uraian)		1. Media Tracking 2. Wawancara lingkaran calon 3. Terbitan/Publikasi/Opini Calon di media sosial atau di media massa

---

Transparency International Indonesia

Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807

Email: [info@ti.or.id](mailto:info@ti.or.id)

Website: [ti.or.id](http://ti.or.id)

Instagram: [@tiindonesia](https://www.instagram.com/tiindonesia)

YouTube: [@Transparency International Indonesia](https://www.youtube.com/Transparency International Indonesia)

Facebook: [@Transparency International Indonesia](https://www.facebook.com/Transparency International Indonesia)

Twitter: [@TIIndonesia](https://twitter.com/TIIndonesia)

